

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah suatu upaya dan usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 Bab II, pasal 3 yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.”¹

Hal ini bukanlah suatu yang mudah, namun diperlukan waktu yang panjang, persiapan yang matang, dukungan sumber daya manusia dan sumber daya pendidikan sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak lulusan sekolah yang kurang memiliki kepercayaan diri, kreatifitas dan daya inisiatif sehingga kurang mandiri, positif, dan ketergatungan sehingga masih jauh dari tujuan pendidikan nasional yang ingin dicapai. Hal ini kemungkinan besar akibat proses perobotan. Lulusan

¹ Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Cipta Umbara, 2003), h. 7.

sekolah atas apalagi sekolah lanjutan pertama, bahkan juga lulusan perguruan tinggi, umumnya tidak mandiri (kurang percaya diri) dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah tamat belajar.

Selama dalam pendidikan, peserta didik lebih banyak duduk mendengarkan pengajar menerangkan pelajaran dan menjawab jika ditanya atau disuruh. Setelah tamat mereka bingung karena tidak ada lagi yang menyuruhnya. Dia tidak mampu bergerak jika tidak disuruh.²

Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan potensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Berdasarkan masalah ini, maka berbagai pihak mempertanyakan, apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita? Dari berbagai pengamatan dan analisis, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, sebagaimana tercantun dalam buku Depdiknas, (2002) yang berjudul, “Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah” yaitu:

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan “input-output” yang tidak dilaksanakan secara konsekuen,

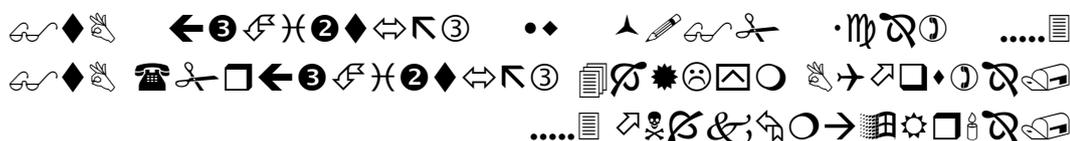
² H. Soesarsono, *Tantangan Pendidikan*, Artikel, t.d.

yaitu kurang menekankan pada proses pendidikan yang justru sangat menentukan output;

2. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Akibatnya, mereka kehilangan kemandirian, kreatifitas/inisiatif, keluwesan, dan motivasi untuk mengembangkan dan menunjukkan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan; dan
3. Peran serta warga sekolah, khususnya guru dan orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi orang tua/masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedangkan dukungan pemikiran, moral, barang, dan jasa kurang diperhatikan.³

Menyadari rendahnya mutu pendidikan bangsa Indonesia, terlebih khusus lagi di madrasah dan kelemahan-kelemahan di bidang manajemen. Menurut Husni Rahim, (2001) yang dikutip dari makalah Drs. H. Aspihan Djarman (2002) berpendapat: “Lembaga Pendidikan Islam seperti madrasah, pertama-tama dituntut untuk melakukan perubahan-perubahan strategis dalam bidang manajemen.”⁴

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat pada surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi:



³ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktoral Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 2002), h. 1-2.

⁴ Aspihan Djarman, *Makalah Peluang dan Tantangan Manajemen Berbasis Sekolah*, (Banjarmasin: 2002).

Dari ayat ini Allah telah menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mempunyai keinginan untuk merubah nasibnya.

Era reformasi yang sudah kita jalani saat ini ditandai oleh beberapa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, moneter, hankam, dan kebijakan mendasar lainnya. Di antara perubahan tersebut adalah lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut membawa konsekuensi terhadap bidag-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom, termasuk di bidang pendidikan.

Keinginan pemerintah agar pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi menuntut partisipasi masyarakat secara aktif untuk merealisasikan otonomi daerah. Oleh karena itu, perlu kesiapan sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan operasional pendidikan.⁵

Berkaitan dengan pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi, Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:



⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT. Rosda Karya, 2002), h. 4

Ayat di atas, menjelaskan bahwa sebagai khalifah, manusia mempunyai peranan ideal yang harus dijalankan yaitu memakmurkan bumi, mendiami dan memeliharanya serta mengembangkannya demi kemaslahatan hidup mereka.⁶

Untuk kepentingan ini, paradigma manajemen madrasah harus mengalami pergeseran dari paradigma lama ke paradigma baru, yaitu:

- a. Dari posisi subordinatif ke posisi otonom,
- b. Dari strategi sentralistik ke strategi desentralistik,
- c. Dari pengambilan keputusan otoritatif ke pengambilan keputusan partisipatif,
- d. Dari pendekatan birokratif ke pendekatan profesional, dan
- e. Dari model penyeragaman ke model keragaman.⁷

Paradigma baru manajemen madrasah yang disarankan oleh Husni Rahim tersebut sebenarnya adalah substansi dari Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Sekarang muncul pertanyaan, seberapa besarkah peluang dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di madrasah, khususnya di Kalimantan Selatan, dan lebih khusus lagi di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin yang akan penulis jadikan sebagai tempat penelitian ini.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin, telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan cukup baik. Kegiatan ini tentu saja sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1

⁶ Herry Noer Aly dan H. Munzier, *Watak Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Friska Agung Inasni, 2003), h. 126.

⁷ Depdiknas, *Op. Cit.*, h. 3.

Banjarmasin. Kemudian timbul pertanyaan, sejauh mana peluang dan tantangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang telah mereka laksanakan?

Didasari atas kenyataan inilah, maka penulis sangat tertarik untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dengan mengadakan penelitian ilmiah yang dituangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul, “PELUANG DAN TANTANGAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS) PADA MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 1 BANJARMASIN.”

B. Penegasan Judul dan Pembahasan

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman tentang pengertian judul di atas, maka penulis perlu memberikan tentang penegasan istilah mengenai peluang dan tantangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Sebelum penulis menguraikan pengertian peluang dan tantangan, terlebih dahulu dijelaskan makna dari kata peluang, tantangan, dan Manajemen Berbasis Sekolah.

1. Pengertian Peluang

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata “peluang” berarti kesempatan, kesempatan yang baik-baik jangan disia-siakan.⁸

Adapun peluang yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah segala suatu keadaan atau kondisi, baik yang ada atau yang sudah ada yang bisa diraih dan diperjuangkan dalam menunjang keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 745.

2. Pengertian Tantangan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “tantangan” berasal dari kata “tantang”, yang berarti bertanding, berperang. Kata “tantang” diakhiri akhiran “an” yaitu menjadi tantangan, yang berarti hal atau obyek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah rangsangan (untuk berkerja lebih giat dan sebagainya).⁹

Adapun tantangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat sehingga mengurangi keberhasilan dalam proses implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin yang harus segera dicari solusinya.

Istilah Manajemen Berbasis Sekolah merupakan terjemahan dari *school-based management*. MBS merupakan paradigma baru pendidikan, yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (keterlibatan masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah leluasa mengelola sumber daya yang meliputi sumber dana insan, yaitu sumber daya ketenagaan, partisipasi masyarakat, partisipasi pemerintah dan sistem organisasi. Sedangkan yang non insan yaitu sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat.¹⁰

Jadi, yang dimaksud dengan judul di atas adalah penelitian tentang bagaimana peluang dan tantangan dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang antara lain meliputi sumber daya manusia (ketenagaan),

⁹ *Ibid*, h. 1.008.

¹⁰ E. Mulyasa, *Op.cit.*, h. 24.

sarana dan prasarana, dana dan sumber dana, sistem organisasi, partisipasi masyarakat dan partisipasi pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin.

C. Perumusan Masalah

Agar terarah permasalahan yang diteliti, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peluang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang meliputi sumber daya manusia (ketenagaan), sarana dan prasarana, dana dan sumber dana, system organisasi, partisipasi masyarakat dan partisipasi pemerintah pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin?
2. Bagaimana tantang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang meliputi sumber daya manusia (ketenagaan), sarana dan prasarana, dana dan sumber dana, sistem organisasi, partisipasi masyarakat dan partisipasi pemerintah pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin?

D. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat judul di atas, diantaranya adalah:

1. Dalam dunia pendidikan konsep Manajemen Berbasis Sekolah dirasakan sangat diperlukan untuk melakukan perubahan-perubahan strategis dalam bidang manajemen, oleh karena itu pihak sekolah yang diberikan keleluasaan untuk mengelola sekolahnya masing-masing.
2. MAN 1 Banjarmasin merupakan lembaga pendidikan formal yang merupakan sekolah unggulan di kota Banjarmasin.
3. Dengan menerapkan peluang dan tantangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), maka pengetahuan kepala sekolah khususnya dan ketenagaan yang lainnya pada umumnya lebih matang terhadap peluang dan tantangan sekolah, sehingga mereka dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar peluang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang meliputi sumber daya manusia (ketenagaan), sarana dan prasarana, dana dan sumber dana, sistem organisasi, partisipasi masyarakat dan partisipasi pemerintah pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tantangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang meliputi sumber daya manusia (ketenagaan), sarana dan prasarana, dana dan sumber dana, sistem organisasi, partisipasi masyarakat

dan partisipasi pemerintah pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin.

F. Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang ada di Kalimantan Selatan dan pada umumnya semua instansi pendidikan secara nasional.
2. Dapat menambah bahan kajian, khususnya mengenai pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan.
3. Sebagai informasi untuk kepala sekolah, guru, dan tata usaha dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di sekolah Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta.
4. Sebagai tambahan wawasan bagi penulis, khususnya tentang bagaimana peluang dan tantangan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dalam lembaga pendidikan sebagaimana pada sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Banjarmasin.
5. Sebagai bahan kajian atau khazanah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan pada perpustakaan Fakultas Tarbiyah dan perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, penegasan judul, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Tinjauan Teoritis, meliputi pengertian Manajemen Berbasis Sekolah, tujuan dan manfaat Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), prinsip-prinsip Manajemen dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), peluang dan tantangan Manajemen Berbasis Sekolah.
- Bab III Metode Penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.
- Bab IV Laporan Hasil Penelitian, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.
- Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.